# Menggempur Penyelundupan Narkoba di Selat Singapura: Peran Operasi Intelijen Maritim dalam Mendukung Tugas Kodaeral IV

**Iwan Kurniawan[1], Sui Purnomo[2], Muhammad Ilham[3]**
[1,2,3]Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia
*E-mail: hisyammuabarak060484@gmail.com*

**Article Info**
**Article History**
Received: 2025-10-07
Revised: 2025-11-13
Published: 2025-12-06

**Keywords:**
*Maritime Intelligence;*
*Kodaeral IV;*
*Narcotics Smuggling;*
*Singapore Strait;*
*Predictive Intelligence;*
*Maritime Resilience.*

**Abstract**
This research aims to analyze and optimize the role of maritime intelligence in supporting the duties of Kodaeral IV to combat narcotics smuggling in the Singapore Strait, one of the busiest sea lanes in the world with a high level of vulnerability to transnational crime. Using a descriptive qualitative approach and case study method, the research draws on in-depth interviews with key officers and other stakeholders. Findings show that while maritime intelligence plays an effective role in detecting and responding to smuggling activities, there remain significant challenges, such as personnel limitations, insufficient non-AIS vessel detection, and weak inter-agency coordination. To address these, the research proposes an optimization model based on predictive intelligence through capacity building, modernization of surveillance equipment, and establishment of a Maritime Intelligence Coordination Center (MICC), with active coastal community involvement. These results are expected to strengthen national maritime resilience and the effectiveness of law enforcement in this strategic region

**Artikel Info**
**Sejarah Artikel**
Diterima: 2025-10-07
Direvisi: 2025-11-13
Dipublikasi: 2025-12-06

**Kata kunci:**
*Intelijen Maritim;*
*Kodaeral IV;*
*Penyelundupan Narkoba;*
*Selat Singapura;*
*Predictive Intelligence;*
*Ketahanan Maritim.*

**Abstrak**
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan peran intelijen maritim dalam mendukung tugas Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral IV guna mengatasi penyelundupan narkoba di Selat Singapura, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan lintas negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap perwira Sintel Kodaeral IV, tim F1QR, serta pejabat Bakamla, Bea Cukai, dan BNN. Hasil penelitian menunjukkan peran efektif intelijen namun dihadapkan pada kendala signifikan: keterbatasan personel, minimnya deteksi kapal non-AIS, serta lemahnya koordinasi lintas lembaga. Solusi yang diusulkan meliputi optimalisasi berbasis predictive intelligence, penguatan SDM, modernisasi fasilitas pengawasan, serta pembentukan MICC dan pelibatan masyarakat pesisir. Temuan ini diharapkan memperkuat ketahanan maritim nasional dan efektivitas penegakan hukum di kawasan strategis ini.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai mencapai 108.000 kilometer. Posisi geografisnya yang strategis, diapit oleh dua samudra dan dua benua, menjadikan Indonesia sebagai jalur vital perdagangan dunia sekaligus arena strategis bagi keamanan kawasan (Kristiyanti & Mahendro, 2025). Salah satu wilayah paling penting dalam konteks tersebut adalah Selat Singapura, jalur sempit yang menjadi pintu gerbang utama perdagangan internasional antara Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Secara hukum, Indonesia dan Singapura telah menyepakati batas maritimnya melalui dua perjanjian, yaitu Perjanjian 25 Mei 1973 yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973, serta Perjanjian 10 Maret 2009 di Jakarta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Kedua undang-undang ini menegaskan batas wilayah laut kedua negara di bagian barat Selat Singapura dan menjadi dasar hukum pengelolaan serta pengawasan keamanan maritim di wilayah tersebut.

Namun, posisi strategis Selat Singapura juga membawa konsekuensi serius. Jalur ini merupakan bagian dari Sea Lines of Communication (SLOC) dan Sea Lines of Trade (SLOT)" jalur perlintasan kapal niaga internasional yang termasuk paling sibuk di dunia. Setiap hari, ribuan kapal dari berbagai negara melintas di kawasan ini, mengangkut barang, bahan bakar, hingga komoditas berharga. Tingginya intensitas pelayaran di kawasan tersebut menyebabkan meningkatnya potensi pelanggaran hukum dan aktivitas ilegal seperti penyelundupan manusia, perdagangan senjata, migran ilegal, dan terutama

penyelundupan narkoba. Kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura memperkuat potensi ini, sebagaimana tergambar dalam peta kerawanan wilayah kerja Kodaeral IV, yang menunjukkan tingginya aktivitas mencurigakan di beberapa titik perairan strategis (Pushidrosal, 2023; Sintel Kodaeral IV, 2025).

Indonesia saat ini menghadapi situasi darurat narkoba yang kian mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK, 2024), prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 3,3 juta orang, dengan sebagian besar pengguna berasal dari kalangan muda. Tak hanya berdampak sosial dan kesehatan, peredaran narkoba juga terkait erat dengan kejahatan ekonomi, terutama pencucian uang. PPATK melaporkan nilai transaksi kejahatan narkotika dan pencucian uang mencapai Rp99 triliun pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan bahwa peredaran narkoba bukan hanya persoalan kriminal, melainkan telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat narkoba, sehingga diperlukan tindakan tegas dan menyeluruh untuk memutus jaringan peredaran narkotika sampai ke akar-akarnya.

Kondisi ini sejalan dengan data lapangan dari Kodaeral IV, yang menunjukkan tren peningkatan signifikan pada hasil operasi penindakan penyelundupan di perairan perbatasan Malaysia dan Singapura selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2022 hingga 2024, jumlah kasus terus meningkat, dan hingga Mei 2025 telah tercatat empat kasus besar penyelundupan narkoba. Fakta tersebut memperkuat temuan PPATK bahwa 80% penyelundupan narkotika ke Indonesia dilakukan melalui jalur laut, termasuk Selat Singapura yang menjadi titik transit strategis sindikat internasional (Kardiati, 2025).

Salah satu kasus paling menonjol terjadi pada 13 Mei 2025, ketika tim F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun berhasil menangkap kapal ikan berbendera Thailand yang membawa sekitar dua ton sabu di perairan Selat Durian, Kepulauan Riau. Keberhasilan tersebut berawal dari informasi intelijen yang diterima oleh Satuan Intelijen Kodaeral IV. Seminggu kemudian, pada 21 Mei 2025, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan BNN dan Bea Cukai kembali menggagalkan penyelundupan dua ton sabu dari kapal tanker MT Sea Dragon di perairan utara Pulau Rangsang. Kedua operasi ini menunjukkan betapa pentingnya peran intelijen maritim dalam mendukung keberhasilan operasi laut cepat yang dilaksanakan oleh F1QR.

Dalam konteks teori, optimalisasi bermakna sebagai upaya mencapai hasil maksimal melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif (Santosa, Winarna, & Nugroho, 2024). Sedangkan teori peran intelijen (Wawan Triyono, Irwanto, & Effendi, 2024) menjelaskan bahwa intelijen maritim berfungsi sebagai sistem deteksi dini dan pengarah kebijakan operasional yang berorientasi pada keamanan nasional. Dengan kata lain, keberhasilan operasi laut seperti F1QR sangat bergantung pada kinerja intelijen yang cepat, tepat, dan akurat. Dalam praktiknya, Kodaeral IV menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi efektivitas intelijen maritim, antara lain keterbatasan personel dan kompetensi SDM, minimnya peralatan surveillance modern, belum tersedianya sistem deteksi untuk kapal tanpa Automatic Identification System (AIS), serta lemahnya koordinasi dengan instansi terkait (Hasan, Partono, Kusuma, & Zulfikar, 2024).

Dari perspektif hukum dan strategi keamanan, TNI Angkatan Laut memegang peran ganda: menjaga kedaulatan wilayah laut dan menegakkan hukum di perairan yurisdiksi nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TNI AL membentuk “Western Fleet Quick Response (WFQR)” kini dikenal sebagai “Fleet One Quick Response (F1QR)” yang berfungsi sebagai satuan penindak cepat berbasis wilayah kerja pangkalan. F1QR didesain untuk merespons ancaman laut secara fleksibel dan proporsional dengan mengutamakan kecepatan serta ketepatan dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran di wilayah barat, termasuk Selat Malaka, Selat Philip, dan Selat Singapura. Keberadaan F1QR menjadi bukti pentingnya sinergi antara sistem intelijen maritim dan operasi taktis di lapangan untuk menjaga keamanan jalur perdagangan laut nasional (Legiyanto et al., 2024).

Namun, penelitian terdahulu menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemahaman tentang peran optimal intelijen maritim dalam konteks operasi keamanan laut regional, khususnya di Selat Singapura. Sebagian penelitian fokus pada koordinasi antar lembaga (Chairil, Kusuma Putri, & Gabiella, 2016; Prabowo, Panggabean, & Hutahaean, 2023), penguatan diplomasi keamanan (Zhafirah, 2024), atau penerapan sistem deteksi terintegrasi di ALKI III (Santosa et al., 2024). Namun, belum ada studi yang secara mendalam menelaah

bagaimana Kodaeral IV sebagai institusi strategis dapat mengoptimalkan fungsi intelijen maritim dalam mendukung operasi penindakan narkoba di Selat Singapura. Padahal, kawasan ini merupakan simpul utama SLOC dan SLOT dunia yang paling rawan disusupi aktivitas ilegal lintas negara. Di sisi lain, Hutasoit (2025) menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam memperkuat jejaring intelijen berbasis komunitas (community-based maritime intelligence). Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di wilayah kerja Kodaeral IV, di mana partisipasi nelayan dapat memperluas cakupan deteksi dini dan mempercepat pertukaran informasi. Dalam tataran internasional, Rakhmagina dan Shiddiqy (2025) menegaskan bahwa penguatan kerja sama maritim antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi langkah penting dalam menekan ancaman lintas batas, sementara Hikam dan Praditya (2015) menegaskan bahwa posisi Indonesia yang strategis menuntut sistem pertahanan maritim adaptif yang berbasis intelijen strategis.

Dengan mempertimbangkan berbagai fakta empiris dan hasil kajian sebelumnya, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk membangun suatu sistem intelijen maritim yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada deteksi dini (predictive intelligence) di wilayah kerja Kodaeral IV. Sistem ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan TNI Angkatan Laut dalam mengantisipasi dan menindak penyelundupan narkoba di Selat Singapura secara cepat, tepat, dan terukur. Adapun kebaruan penelitian ini tercermin dari pendekatan yang lebih komprehensif dan multidimensional dibandingkan studi-studi terdahulu. Penelitian ini mengintegrasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia intelijen melalui pelatihan berkelanjutan dan penguasaan teknologi informasi modern dengan pengembangan sistem koordinasi lintas lembaga yang berbasis real-time intelligence sharing. Selain itu, optimalisasi sarana dan prasarana pendukung seperti radar maritim, drone pengintai, serta sistem deteksi untuk kapal tanpa Automatic Identification System (AIS) menjadi bagian penting dari inovasi penelitian ini. Tak kalah penting, penelitian ini juga menekankan penerapan model kolaboratif yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, serta komunitas pesisir sebagai satu kesatuan jaringan intelijen yang adaptif dan responsif terhadap ancaman di laut.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan teoretis bagi penguatan sistem pertahanan maritim nasional, khususnya dalam mendukung tugas Kodaeral IV dalam memberantas penyelundupan narkoba di Selat Singapura. Optimalisasi peran intelijen maritim tidak hanya berimplikasi pada keberhasilan operasi keamanan laut, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi kedaulatan dan ketahanan nasional Indonesia di tengah meningkatnya ancaman non-militer di kawasan maritim strategis dunia (Sutisna & Rofii, 2022; Wawan Triyono et al., 2024; Rakhmagina & Shiddiqy, 2025).

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik wawancara mendalam terhadap aktor kunci (Sintel Kodaeral IV, F1QR, Bakamla, Bea Cukai, BNN), observasi lapangan, dan penelaahan dokumen serta triangulasi data untuk keabsahan temuan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Uraian tentang situasi faktual keamanan maritim Selat Singapura, tren pelanggaran, serta data operasi penindakan Kodaeral IV dan kontribusi F1QR. Termasuk analisis faktor: SDM, teknologi, sarana deteksi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat pesisir.

### B. Pembahasan

1. Kondisi Faktual Keamanan Maritim di Selat Singapura

   Selat Singapura terletak di wilayah perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura. Secara hukum, kedua negara telah menyelesaikan penetapan batas maritimnya pada tanggal 25 Mei 1973 dan 10 Maret 2009 di Jakarta. Implementasi dari kesepakatan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1973 tentang *Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura* serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Singapura mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura*. Implikasi dari perjanjian tersebut adalah bahwa Selat Singapura, yang merupakan jalur perlintasan bagi kapal-kapal dari berbagai negara, termasuk dalam kategori *Sea Lines of Communication*

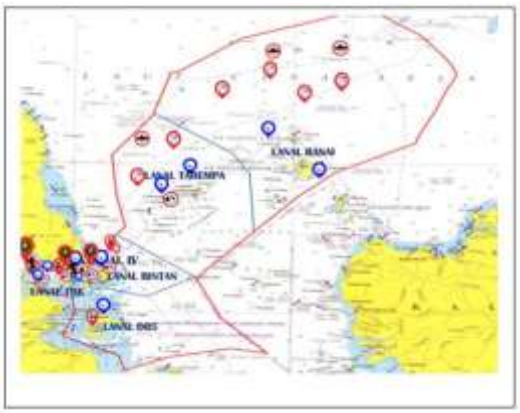
(SLOC) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT), yang menjadikannya sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Sehubungan dengan itu, apabila tidak diantisipasi melalui sistem pengawasan yang memadai, jalur tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan penyelundupan barang-barang ilegal.

Situasi di Selat Malaka dan Selat Singapura yang merupakan dua jalur pelayaran tersibuk di dunia menunjukkan potensi tingkat kerawanan yang cukup tinggi, khususnya bagi perlintasan kapal dan aktivitas manusia melalui laut. Tingginya tingkat kerawanan tersebut dapat dipahami dari kondisi geografis Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Selat Singapura merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kerawanan tertinggi di wilayah kerja Kodaeral IV, terutama terkait aktivitas penyelundupan lintas negara. Berdasarkan peta kerawanan laut Sintel Kodaeral IV (2025), kawasan ini menampilkan beberapa titik merah pada perairan barat Batam, perbatasan Tanjung Balai Karimun, dan sekitar Pulau Nipah wilayah yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional untuk aktivitas ilegal seperti penyelundupan manusia, perdagangan satwa, dan peredaran narkotika.




**Gambar 1.** Peta Jalur Perlintasan Kapal-kapal di Selat Singapura yang Berbatasan Langsung dengan Indonesia.
*Sumber: Peta Batas Maritim RI-Singapura, 2023, Hasil Olahan Peneliti, 2025*

Kepadatan pelayaran yang luar biasa tinggi, dengan ribuan kapal melintas setiap harinya, menjadikan wilayah ini bagian dari *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan *Sea Lines of Trade* (SLOT) terpadat di dunia. Meskipun secara hukum Indonesia dan Singapura telah menetapkan batas wilayah maritim melalui UU Nomor 7 Tahun 1973 dan UU Nomor 4 Tahun 2010, pengawasan di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Menurut informan dari Sintel Kodaeral IV, keterbatasan radar jarak jauh, alat deteksi kapal tanpa *Automatic Identification System (AIS)*, dan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah operasi, menyebabkan banyak aktivitas mencurigakan tidak terpantau secara *real-time*.



**Gambar 2.** Peta Kerawanan di Wilayah kerja Kodaeral IV.
*Sumber: Sintel Kodaeral IV, 2025*

Terlihat pada gambar di atas menunjukkan situasi titik-titik rawan yang tertuang dalam peta kerawanan di perairan barat yang termasuk dalam wilayah kerja Kodaeral IV. Sebagaimana terlihat pada kondisi di Selat Singapura, peta tersebut memperlihatkan adanya potensi kerawanan yang cukup tinggi. Wilayah ini kerap dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana di laut sebagai jalur untuk melakukan berbagai bentuk penyelundupan, seperti penyelundupan manusia, pekerja migran ilegal, narkoba, satwa liar, dan barang-barang ilegal lainnya, serta tindak pidana perompakan dan pelanggaran pelayaran.

Melihat situasi tersebut, perhatian utama saat ini tertuju pada penyelundupan narkoba melalui jalur laut, sebagaimana tergambar dalam peta kerawanan di Selat Singapura. Indonesia kini tengah menghadapi situasi darurat narkoba yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK, 2024), angka

prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah mencapai sekitar 3,3 juta orang. Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar pengguna berasal dari kalangan generasi muda, yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.

Selain berdampak pada aspek sosial dan kesehatan, peredaran gelap narkoba juga melibatkan praktik kejahatan ekonomi, terutama pencucian uang. Dalam laporan yang sama, PPATK mengungkapkan bahwa nilai transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika dan pencucian uang mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp99 triliun. Fenomena ini menegaskan bahwa peredaran narkoba bukan sekadar persoalan kriminal, melainkan telah menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas nasional yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi, termasuk pada sektor pertahanan dan keamanan maritim. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi salah satu target utama pasar dan peredaran narkoba internasional.

Fenomena ini diperkuat oleh data PPATK (2024) yang menunjukkan bahwa 80 persen peredaran narkoba di Indonesia masuk melalui jalur laut, dan sebagian besar kasus tersebut terjadi di kawasan perairan barat, termasuk Selat Singapura. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara bersama pejabat F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun yang menyebut bahwa jalur laut dari Thailand dan Malaysia sering dimanfaatkan sebagai koridor distribusi narkotika ke Batam dan daerah pesisir Sumatera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas geografis dan tingginya aktivitas perdagangan laut di Selat Singapura menjadi tantangan serius bagi pengawasan maritim nasional. Ancaman penyelundupan narkoba bukan hanya berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi, tetapi juga telah menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional, sebagaimana dinyatakan oleh Hikam dan Praditya (2015) bahwa kejahatan lintas batas di wilayah maritim dapat menjadi instrumen proxy war non-militer yang melemahkan bangsa dari dalam.

2. Peran Strategis Kodaeral IV dan Intelijen Maritim dalam Operasi Penindakan

Temuan penelitian lapangan mengindikasikan bahwa peran intelijen maritim di lingkungan Kodaeral IV telah berjalan sesuai dengan fungsi dasarnya, yaitu sebagai elemen deteksi dini terhadap ancaman keamanan laut. Intelijen berperan dalam pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi taktis kepada unsur operasi, termasuk *Fleet One Quick Response* (F1QR) yang bertugas melakukan tindakan cepat di lapangan.




**Gambar 3.** Hasil Operasi/Penindakan oleh Kodaeral IV Terhadap Penyelundupan Lewat laut di Perbatasan Singapura.
*Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025*

Data pada Gambar 1 memperlihatkan adanya tren peningkatan signifikan dalam jumlah operasi dan penindakan yang dilakukan oleh Kodaeral IV terhadap kasus penyelundupan narkoba melalui jalur laut di wilayah perbatasan Singapura selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat empat kasus, naik menjadi lima kasus pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya dengan tujuh kasus pada tahun 2024. Sementara itu, hingga Mei 2025 jumlah kasus yang berhasil ditindak sebanyak empat kasus, yang menunjukkan bahwa tingkat aktivitas penyelundupan masih berada pada level tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

Kecenderungan meningkatnya jumlah penindakan tersebut dapat dimaknai secara dualistik. Di satu sisi, peningkatan ini mencerminkan semakin efektifnya intelijen maritim Kodaeral IV dalam mendeteksi serta menindak upaya penyelundupan narkoba di wilayah tanggung jawabnya. Namun di sisi lain, tren tersebut juga mengindikasikan bahwa ancaman penyelundupan narkoba melalui jalur laut di Selat Singapura tetap menjadi persoalan serius yang membutuhkan

strategi pengawasan yang lebih intensif, adaptif, dan berkelanjutan.

Hasil temuan lapangan menegaskan bahwa intelijen maritim memiliki peran sentral sebagai elemen deteksi dini sekaligus pengarah bagi pelaksanaan operasi di lapangan. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan pemantauan intelijen menjadi dasar utama bagi unsur *Fleet One Quick Response* (F1QR) dalam melaksanakan tindakan cepat di titik-titik rawan penyelundupan. Kolaborasi yang erat antara unsur intelijen dan unsur operasi terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan berbagai operasi besar dalam menggagalkan aktivitas penyelundupan narkoba lintas negara.

Salah satu bukti konkret sinergi tersebut terlihat dari keberhasilan Kodaeral IV dalam dua operasi besar pada Mei 2025. Operasi pertama terjadi pada 13 Mei 2025, ketika F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun berhasil menggagalkan penyelundupan sekitar dua ton sabu-sabu dari kapal berbendera Thailand di Selat Durian. Aksi ini diawali oleh hasil deteksi intelijen Sintel Kodaeral IV terhadap pergerakan mencurigakan di radar pantai, yang kemudian diteruskan kepada komando operasi untuk dilakukan pengejaran dan penggeledahan hingga ditemukan 95 karung berisi narkoba.



**Gambar 4.** Penangkapan Kapal Ikan Thailand oleh TIM F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun di Selat Durian, Kepulauan Riau.
*Sumber: Sintel Kodaeral IV, 2025*

Operasi kedua dilaksanakan pada 21 Mei 2025, ketika Kodaeral IV bekerja sama dengan BNN dan Bea Cukai berhasil mengamankan kapal tanker MT Sea Dragon di utara Pulau Rangsang. Berdasarkan informasi intelijen, kapal tersebut diduga membawa narkoba dari Thailand menuju perairan Indonesia. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sekitar 2.000 bungkus sabu-sabu dengan total berat dua ton. Operasi ini mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas lembaga antara unsur intelijen maritim, satuan patroli laut, dan lembaga penegak hukum nasional.




**Gambar 5.** Penangkapan Speedboat penyeludup Ekstasi oleh TIM F1QR Lanal Tanjung Balai Karimun
*Sumber: Sintel Kodaeral IV, 2025*

Dua kasus besar tersebut memperkuat pemahaman bahwa intelijen maritim berperan sebagai tulang punggung dalam keberhasilan operasi laut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wawan Triyono,

Irwanto, dan Effendi (2024) yang menekankan bahwa keberhasilan operasi keamanan laut sangat bergantung pada kualitas informasi awal serta kecepatan respon taktis di lapangan. Namun, hasil wawancara dengan perwira Sintel Kodaeral IV menunjukkan bahwa efektivitas sistem intelijen di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam aspek integrasi data secara real-time antarinstansi dan keterbatasan kemampuan teknologi deteksi. Oleh karena itu, peran intelijen maritim saat ini dapat dikatakan vital namun belum sepenuhnya optimal. Diperlukan langkah penguatan di tiga bidang utama, yaitu peningkatan kompetensi sumber daya manusia, modernisasi peralatan intelijen, dan penyempurnaan koordinasi lintas lembaga, agar kemampuan deteksi dan pencegahan di wilayah perairan strategis seperti Selat Singapura dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

3. Faktor Penghambat Optimalisasi Intelijen Maritim

Hasil analisis lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor mendasar yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan peran intelijen maritim di Kodaeral IV, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kelembagaan, maupun partisipasi masyarakat. Hambatan-hambatan ini secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi intelijen sebagai elemen deteksi dini dan penunjang keberhasilan operasi keamanan laut di wilayah perbatasan Selat Singapura.

Pertama, dari aspek sumber daya manusia (SDM), ditemukan bahwa jumlah personel intelijen masih sangat terbatas dibandingkan dengan cakupan wilayah tanggung jawab operasi Kodaeral IV yang luas. Berdasarkan data internal, personel yang ditempatkan di wilayah Batam, Karimun, dan sekitarnya belum mencukupi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemantauan secara berkesinambungan, terutama di wilayah-wilayah yang dikenal sebagai titik rawan penyelundupan. Keterbatasan ini tidak hanya terkait kuantitas, tetapi juga kualitas kemampuan personel. Sebagian anggota intelijen belum memperoleh pelatihan lanjutan dalam bidang analisis data intelijen, pemetaan ancaman maritim, serta penguasaan teknologi *surveillance* modern. Akibatnya, proses analisis situasi seringkali masih bergantung pada informasi konvensional dan laporan lapangan manual, yang berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Hasan, Partono, Kusuma, & Zulfikar (2024) yang menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM militer melalui pelatihan berbasis teknologi dan kemampuan intelijen taktis dalam menghadapi ancaman non-konvensional di laut.

Kedua, dari aspek sarana dan prasarana pendukung, Kodaeral IV masih menghadapi keterbatasan fasilitas modern yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas kegiatan intelijen maritim. Fasilitas radar pantai yang tersedia belum memiliki jangkauan deteksi maksimal di seluruh perairan strategis, terutama di wilayah perbatasan yang padat lalu lintas kapal. Keterbatasan jumlah *unmanned aerial vehicle (UAV)* atau drone maritim juga membatasi kemampuan pemantauan udara di area yang tidak dapat dijangkau kapal patroli. Selain itu, masih banyak kapal tanpa *Automatic Identification System (AIS)* yang tidak dapat terdeteksi, sehingga memperbesar peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan celah pengawasan. Menurut Santosa, Winarna, & Nugroho (2024), penggunaan sistem teknologi maritim terintegrasi, seperti *Integrated Maritime Surveillance System (IMSS)* dan radar satelit berbasis real-time, mampu secara signifikan meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Sayangnya, penerapan sistem tersebut di wilayah barat Indonesia, termasuk di Selat Singapura, masih sangat terbatas akibat kendala anggaran, infrastruktur, dan interoperabilitas antar lembaga.

Ketiga, dari aspek koordinasi kelembagaan, hubungan operasional antara TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Polair masih belum terintegrasi secara optimal dalam satu sistem berbagi data intelijen (*intelligence sharing system*) yang terpadu. Masing-masing instansi masih memiliki mekanisme pelaporan dan pengolahan data yang berbeda, sehingga menyebabkan tumpang

tindih informasi dan memperlambat respon terhadap ancaman di lapangan. Beberapa informan dari Sintel Kodaeral IV bahkan menyebutkan bahwa keterlambatan penyampaian data intelijen sering kali membuat momentum operasional terlewatkan, padahal kecepatan merupakan kunci utama dalam penindakan di laut. Temuan ini memperkuat pandangan Sutisna & Rofii (2022) yang menyatakan bahwa lemahnya koordinasi lintas lembaga menjadi salah satu penyebab utama inefisiensi operasi keamanan maritim di Indonesia. Lemahnya koordinasi juga berdampak pada duplikasi kegiatan patroli antarinstansi, sehingga efektivitas pengawasan di lapangan menjadi tidak maksimal.

Keempat, dari aspek partisipasi masyarakat pesisir, keterlibatan publik dalam mendukung kegiatan intelijen maritim masih belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, wilayah pesisir merupakan titik awal yang paling strategis untuk mendapatkan informasi dini tentang aktivitas mencurigakan di laut. Para nelayan dan masyarakat pesisir sering kali memiliki pengetahuan lokal yang luas terkait pola pergerakan kapal, jalur penyelundupan, maupun aktivitas ilegal di sekitar wilayah mereka. Namun, hingga kini, mekanisme formal untuk mengintegrasikan masyarakat dalam sistem jaringan intelijen terbuka (*community-based maritime intelligence*) belum terbangun secara sistematis. Menurut Hutasoit (2025), pelibatan masyarakat dalam jejaring intelijen bukan hanya memperluas cakupan deteksi, tetapi juga memperkuat sistem peringatan dini (*early warning system*) yang lebih adaptif dan efisien. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, kegiatan pengawasan laut dapat menjadi lebih responsif karena melibatkan sumber informasi langsung dari lapangan.

Keempat faktor tersebut saling berkelindan dan memperlihatkan bahwa upaya optimalisasi intelijen maritim tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral. Diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek militer, tetapi juga memperkuat dimensi teknologi, kelembagaan, dan sosial kemasyarakatan. Integrasi antara penguatan SDM, modernisasi sarana deteksi, peningkatan koordinasi lintas lembaga, dan pelibatan masyarakat merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan sistem intelijen maritim yang efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan intelijen maritim Kodaeral IV dapat benar-benar berfungsi sebagai sistem deteksi dini yang proaktif, prediktif, dan adaptif terhadap dinamika ancaman penyelundupan narkoba di kawasan strategis Selat Singapura.

4. Strategi Optimalisasi Peran Intelijen Maritim di Kodaeral IV

Berdasarkan hasil analisis empiris dan kajian teoretis, penelitian ini merumuskan model optimalisasi peran intelijen maritim di Kodaeral IV yang bersifat integratif, adaptif, dan berbasis kolaborasi lintas lembaga untuk menjawab dinamika ancaman penyelundupan narkoba di Selat Singapura. Model ini disusun dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), modernisasi sarana dan teknologi intelijen, serta pembentukan mekanisme koordinasi dan kolaborasi strategis antarinstansi. Ketiga aspek ini dirancang untuk saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam rangka mewujudkan sistem intelijen maritim yang efisien, akurat, dan responsif terhadap perubahan pola ancaman lintas negara.

Langkah pertama dalam optimalisasi adalah peningkatan kapasitas SDM intelijen sebagai fondasi utama keberhasilan sistem pengamanan maritim. Dalam konteks ini, Kodaeral IV perlu mengembangkan program pelatihan teknis dan analisis strategis yang lebih terarah dan berkelanjutan. Pelatihan tersebut mencakup kemampuan pemanfaatan data satelit, interpretasi citra radar laut, pemetaan digital berbasis *Geographic Information System (GIS)*, serta peningkatan kemampuan dalam analisis ancaman (threat assessment) terhadap jalur lintasan kapal di wilayah perbatasan. Selain itu, personel intelijen juga perlu dibekali kemampuan komunikasi taktis, penguasaan teknologi informasi, serta analisis big data agar dapat mengolah berbagai sumber informasi secara cepat dan tepat. Menurut Hasan, Partono, Kusuma, & Zulfikar (2024), peningkatan kapasitas SDM dalam bidang

intelijen merupakan investasi strategis untuk menghadapi ancaman non-konvensional, termasuk penyelundupan narkoba yang kian adaptif terhadap perubahan teknologi.

Langkah kedua adalah modernisasi sarana dan prasarana intelijen maritim yang mendukung efektivitas pengawasan di lapangan. Dalam hal ini, Kodaeral IV perlu memperkuat sistem pengawasan maritim melalui penggunaan drone maritim berdaya jelajah tinggi, radar pantai otomatis dengan jangkauan deteksi luas, serta sistem pemantauan berbasis Integrated Maritime Surveillance Network (IMSN) yang mampu memantau aktivitas kapal secara *real-time*. Teknologi ini dapat dikombinasikan dengan sistem pendeteksi kapal non-AIS (Automatic Identification System) sehingga dapat mengidentifikasi kapal yang beroperasi secara ilegal atau mencurigakan. Seperti dijelaskan oleh Santosa, Winarna, & Nugroho (2024), implementasi sistem deteksi terintegrasi akan meningkatkan kemampuan *maritime domain awareness* (MDA) Indonesia, terutama di kawasan perairan padat seperti Selat Singapura yang menjadi jalur utama pergerakan kapal internasional. Dengan sistem yang modern, proses pengumpulan dan distribusi informasi intelijen dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan efisien untuk mendukung pengambilan keputusan operasional di tingkat komando.

Langkah ketiga adalah pembentukan sistem koordinasi lintas lembaga berbasis real-time intelligence sharing yang terpusat di lingkungan Kodaeral IV. Mekanisme ini memungkinkan pertukaran informasi secara simultan antara TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, Polair, dan BNN, sehingga setiap lembaga memiliki akses terhadap data terkini mengenai situasi keamanan laut. Model koordinasi ini dapat diimplementasikan melalui pembentukan *Maritime Intelligence Coordination Center* (MICC) sebagai pusat kendali terpadu untuk analisis dan distribusi informasi strategis. Keberadaan MICC akan mendorong sinergi antar lembaga dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum, menghindari duplikasi kegiatan patroli, serta mempercepat respons terhadap ancaman penyelundupan narkoba. Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep *inter-agency collaboration* sebagaimana dijelaskan oleh Sutisna & Rofii (2022), yang menegaskan bahwa efektivitas operasi maritim sangat bergantung pada integrasi komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Selain penguatan aspek kelembagaan dan teknologi, strategi optimalisasi juga menekankan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat pesisir sebagai bagian dari sistem intelijen terbuka. Kodaeral IV dapat membangun jaringan komunikasi lapangan yang melibatkan nelayan, komunitas maritim, dan kelompok masyarakat pesisir untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pelaporan dini terhadap aktivitas mencurigakan di laut. Pendekatan ini dikenal dengan istilah *community-based maritime intelligence*, yang dinilai efektif dalam memperluas jangkauan deteksi ancaman sekaligus memperkuat hubungan sosial antara aparat keamanan dan masyarakat lokal. Hutasoit (2025) menegaskan bahwa pelibatan masyarakat pesisir bukan hanya meningkatkan akurasi informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap keamanan laut. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem peringatan dini (*early warning system*) yang memperkuat kemampuan deteksi sebelum ancaman berkembang menjadi pelanggaran hukum nyata.

Pendekatan kolaboratif ini juga selaras dengan teori kolaborasi kelembagaan (Chairil, Kusuma Putri, & Gabiella, 2016) yang menekankan pentingnya kerja sama horizontal antar aktor dalam penyelesaian masalah kompleks lintas sektor. Dalam konteks keamanan maritim, kolaborasi ini berarti menyatukan kekuatan dari berbagai entitas — militer, lembaga sipil, dan masyarakat — dalam satu ekosistem pengawasan laut yang terkoordinasi dan saling melengkapi. Kodaeral IV dapat berperan sebagai simpul penggerak yang menghubungkan antarinstansi melalui sistem komunikasi terpadu, sehingga fungsi intelijen maritim tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan prediktif.

Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, intelijen maritim Kodaeral IV diharapkan mampu bertransformasi menjadi sistem yang lebih prediktif,

responsif, dan adaptif terhadap dinamika kejahatan lintas negara. Optimalisasi ini bukan hanya memperkuat kemampuan deteksi dan penindakan terhadap penyelundupan narkoba, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasi *Fleet One Quick Response* (F1QR) di lapangan. Lebih jauh, keberhasilan strategi ini akan memperkokoh posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berketahanan tinggi, sejalan dengan visi global *Poros Maritim Dunia* yang dicanang-kan pemerintah. Implementasi model intelijen maritim terintegrasi di bawah koordinasi Kodaeral IV akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sistem pertahanan non-konvensional, melindungi kedaulatan maritim, serta menciptakan stabilitas keamanan di kawasan strategis Asia Tenggara.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Selat Singapura merupakan kawasan maritim strategis dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap penyelundupan narkoba lintas negara. Posisi geografisnya yang menjadi jalur utama perdagangan dunia (SLOC dan SLOT) menjadikan wilayah ini sangat rentan diman-faatkan oleh jaringan kriminal terorganisasi. Berdasarkan data PPATK (2024) dan laporan Sintel Kodaeral IV (2025), sekitar 80 persen penyelundupan narkoba ke Indonesia dilakukan melalui jalur laut, dengan Selat Singapura sebagai salah satu titik utama perlintasan. Dalam konteks ini, Kodaeral IV memiliki peran vital melalui unsur *Fleet One Quick Response* (F1QR), yang terbukti efektif dalam beberapa operasi besar, termasuk penangkapan dua kapal pengangkut dua ton sabu pada Mei 2025. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran intelijen maritim di Kodaeral IV belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, peralatan *surveillance*, serta koordinasi lintas lembaga. Untuk itu, penelitian ini menekankan pentingnya membangun sistem intelijen maritim yang terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis deteksi dini (predictive intelligence).

### B. Saran

Implikasi kebijakan yang diusulkan meliputi: pembentukan *Maritime Intelligence Coordination Center* (MICC) untuk integrasi data lintas lembaga, modernisasi peralatan pengawasan berbasis radar dan *drone maritim*, serta pelatihan berkelanjutan bagi personel intelijen. Selain itu, pelibatan masyarakat pesisir dalam sistem *community-based maritime intelligence* menjadi strategi efektif untuk memperluas cakupan deteksi dini (Hutasoit, 2025). Dengan langkah-langkah tersebut, Kodaeral IV diharapkan dapat memperkuat maritime domain awareness (MDA) dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum laut, sekaligus mendukung upaya nasional dalam menjaga kedaulatan dan ketahanan maritim Indonesia di kawasan strategis Selat Singapura.

## DAFTAR RUJUKAN

Adhira, D. P. (2025). Strategi intelijen dalam menghadapi ancaman penyelundupan narkoba di wilayah perairan Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP), 14(1).

Agustina, B. N. A. (2022). Peran dan Strategi TNI AL dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Universitas Mataram, 1-25.

Agustina, B. N. A. (2022). Peran dan Strategi TNI AL dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Universitas Mataram, 1-25.

Agustinova, E. D. (2015). Memahami metode penelitian kualitatif teori & praktis. Yogyakarta: Calpulis.

Anam, K., & Harahap, M. S. (2024). PERAN DAN KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DALAM MENANGANI KASUS PENCURIAN MINYAK DI LAUT. LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, 2(1), 51-60.

Basuki, D. G., & Kristiyono. (2024). Analisa peran intelijen TNI Angkatan Laut terhadap kegiatan penyelundupan narkoba di jalur laut guna mendukung keamanan negara. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP), 7(9).

Booth, K. (1973). Navies and foreign policy. London: Groom Helm.

Bungin, B. (2017). Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer. Depok: Rajawali Pers.

Chairil, T., Kusuma Putri, R. A. A., & Gabiella, D. (2016). Menanggulangi migrasi ireguler di laut: Bakamla dan manajemen keamanan maritim di Indonesia. Dalam Prosiding Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional: Benua Maritim Indonesia dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional (Vol. 7). Universitas Hasanuddin, Makassar.

Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hasan, H., Partono, T., Kusuma, B. P., & Zulfikar, W. (2024). Optimalisasi Peran Korem 151/Binaiya Dalam Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar. TheJournalish: Social and Government, 5(3), 242-256.

Hikam, M. A., & Praditya, Y. (2015). Globalisasi dan pemetaan kekuatan strategis pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi ancaman transnasional: Berdasarkan analisis model element of national power:(Political, Military, Economic, Social, Infrastructure, and Information/PMESII). Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, 5(2), 53-70.

Humas Kemenkopolkam. (2025, Agustus 4). Indonesia darurat narkoba. https://polkam.go.id/indonesia-darurat-narkoba-desk-bentukan-menko-polkam-fokus-tiga-upaya-prioritas/

Hutasoit, H. P. (2025). Sinergitas TNI Angkatan Laut dan Polri dalam Membangun Komunitas Masyarakat Berbasis Ketahanan Maritim di Wilayah Hukum Polres Dumai. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 8(4), 3653-3662.

Jayamahe, J. J., Luther, M., & Pandjaitan, M. B. (2023). Peran Lantamal VIII Manado Guna Menjaga Keamanan Laut dan Mendukung Tugas TNI AL. Indonesian Maritime Journal, 11(3), 22-22.

John, A. G. (2010). Assessing intelligence performance. In L. K. Johnson (Ed.), The Oxford handbook of national security intelligence. New York: Oxford University Press.

Kardiati, D. (2025). Peran Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh dalam Penanggulangan Narkotika di Wilayah Perairan Aceh. Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi, 2(1), 118-124.

Kartika, R., & Malau, P. (2021). Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, 7(1), 172-190.

Kementerian Luar Negeri. (2025). Treaty room: Perjanjian batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia. https://kemlu.go.id

Koarmabar. (2015). Kajian integrasi integrated maritime surveillance system dan Western Fleet Quick Response. Jakarta: Koarmabar.

Kristiyanti, M., & Mahendro, I. (2025). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Membangun Strategi Keamanan Maritim Di Indonesia. Majalah Ilmiah Bahari Jogja, 23(1), 1-10.

Legiyanto, A., Hermanto, D. R., SE, M., & Sri Hastuti, S. E. (2024). OPTIMALISASI KEGIATAN PENYELIDIKAN INTELIJEN LANALTBA GUNA MENCEGAH PENYELUNDUPAN DI PERAIRAN TANJUNGBALAI ASAHAN DALAM RANGKA MENDUKUNGTUGAS POKOK LANTAMAL I BELAWAN. JURNAL ILMIAH KAJIAN KEANGKATANLAUTAN, 6(2), 34-42.

Lemhanas. (2025). Kepala BNN: Penyelundupan narkoba 80% lewat jalur laut. https://lemhannas.go.id/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut/id

Loch, K. J. (2010). The Oxford handbook of national security intelligence. New York: Oxford University Press.

Mappiare, A. T. (2009). Dasar-dasar metodologi riset kualitatif untuk ilmu sosial dan profesi. Malang: Jenggala Pustaka Utama.

Martono. (2018). Metode penelitian sosial: Analisis isi dan analisis data. Jakarta: PT Cendikia.

Nawawi, H. (1984). Administrasi pendidikan. Jakarta: Gunung Agung.

PPATK. (2025, Juli 22). Indonesia darurat narkoba: Perputaran uang capai Rp99 triliun.

https://www.ppatk.go.id/news/read/1426/indonesia-darurat-narkoba-perputaran-uang-capai-rp99-triliun.html

Prabowo, D. A., Panggabean, M. L., & Hutahaean, A. (2023). Peran Ditpolair Baharkam Polri dalam mencegah tindak pidana penyelundupan narkotika melalui jalur laut Nusantara. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 367-382.

Rakhmagina, N., & Shiddiqy, M. A. A. (2025). Strategi Bakamla Dalam Menghadapi Ancaman Kejahatan Di Selat Malaka. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 11(2), 12-25.

Santosa, B., Winarna, A., & Nugroho, D. B. (2024). Implementasi Sistem Deteksi Maritim Terintegrasi Guna Meningkatkan Kemampuan Pengendalian Laut di ALKI III dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7(11), 12594-12601.

Saronto, Y. W. (2018). Intelijen: Teori intelijen dan pembangunan jaringan. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sarwono, S. W. (1999). Psikologi sosial: Individu dan teori-teori psikologi sosial. Jakarta: Balai Pustaka.

Sukitno. (2013). Tindak pidana penyelundupan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutisna, M., & Rofii, M. S. (2022). Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 5(1), 1.

Suyadi, M. S., Priyonggo, & Suharto. (2022). Panduan operasional penegakan hukum di perbatasan laut RI–Singapura di wilayah kerja Lantamal IV/TPI. Jurnal Maritim Indonesia, 10(1).

Wawan Triyono, S. T., Irwanto, B., & Sukarno Effendi, S. M. (2024). OPTIMALISASI PERAN INTELIJEN GUNA MENGANTISIPASI KERAWANAN MARITIM DALAM RANGKA MENDUKUNG OPERASI KEAMANAN LAUT DI WILAYAH KERJA